

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA MERANTI MANDIRI DI KELURAHAN
MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020**

Oleh : Dwi Arini Yusmandani

e-mail: dwiariniyusmandani01@gmail.com

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The high rate of population growth in Indonesia makes the government need to strengthen the Population, Family Planning and Family Development (KKBPK) program. Family Planning Village is one of the government's flagship programs in order to create quality small families. Kampung Keluarga Berencana is a regional unit that has certain criteria, where there is an integration of population programs, family planning, family development, and related sector development that is carried out systematically.

The purpose of this study was to determine collaborative governance in the Meranti Mandiri Family Planning Village program, Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City in 2020 and to determine the factors that influence collaborative governance in the Meranti Mandiri Family Planning Village program, Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City in 2020. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The location of this research was in the Meranti Mandiri Family Planning Village, Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City. Data collection techniques used is through interviews and documentation. Data analysis techniques used is data collection, analysis, description and conclusion.

The research results show that Collaborative Governance in implementing the Meranti Mandiri Family Planning Village program in 2020 seen through stages the Face to face dialogue, Trust-building, Commitment to the process, Shared understanding and Intermediate outcomes well done. However, in the implementation of the Trust-building stage has not been maximized. This is because the program implementers do not understand the duties and functions of their field.

Keywords: Collaborative Governance, Family Planning Village

A. PENDAHULUAN

Program Kampung Keluarga Berencana atau yang sering disebut Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintahan periode 2015-2019, terutama pada Agenda Prioritas nomor tiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan agenda prioritas nomor lima “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Bapak Presiden RI.

Kampung Keluarga Berencana itu sendiri adalah “satuan wilayah setingkat Rukun Warga (RW), dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis”.

Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Pusat adalah merujuk pada Surat Edaran Mendagri No.440/70/SJ Tanggal 11 Januari 2016, perihal Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana seluruh Indonesia, selanjutnya Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016 perihal Siaran Langsung Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di seluruh Indonesia.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana, kota ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Riau berdasarkan data Proyeksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau yaitu sebanyak 1.141.083. Pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana di Kota

Pekanbaru mulai dicanangkan pada bulan Mei tahun 2016 lalu meliputi 4 (empat) dan salah satunya adalah Kampung KB Meranti Mandiri di Kelurahan Meranti Pandak.

Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Kota Pekanbaru Tahun 2016 yang salah satunya penetapannya berisi bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir Kelurahan Meranti Pandak merupakan wilayah penetapan pembentukan Kampung Keluarga Berencana.

Kelurahan Meranti Pandak merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana yang diberikan nama Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri. Kelurahan dengan kepadatan penduduk nomor satu di Kecamatan Rumbai Pesisir ini memiliki luas wilayah 3,88km² dan persentase 2,5%, memiliki jumlah penduduk 13.076 dengan jumlah laki-laki sebanyak 6.023 dan perempuan 7.053.

Program Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri Kota Pekanbaru dibagi menjadi 4 (empat) program yang keseluruhannya memiliki kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan lokasi kampung tersebut. Dalam hal ini, penulis berfokus pada Program Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan program ini merupakan program prioritas Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri disesuaikan dengan kondisi Kelurahan Meranti Pandak yang masyarakatnya memerlukan pemberdayaan.

Keberhasilan program Kampung Keluarga Berencana dapat dilihat dari keterlibatan dan dukungan lintas sektoral, baik pemerintah maupun swasta. Namun, dalam pelaksanaannya keterlibatan lintas sektor di Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri juga masih minim.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Program Kampung KB Meranti Mandiri di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada Tahun 2020 ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* Program Kampung KB Meranti Mandiri di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada Tahun 2020 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Program Kampung KB Meranti Mandiri di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* Program Kampung KB Meranti Mandiri di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru pada Tahun 2020.

D. KERANGKA TEORI

1. *Collaborative Governance*

Menurut pendapat Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung agar terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus serta musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau

mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Proses kolaborasi yang dimaksud adalah *Collaborative Governance* yang didefinisikan sebagai proses dan struktur dalam pembuatan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif dalam batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkatan pemerintahan dan/atau masyarakat, swasta dan masyarakat sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai tanpa melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya. Menurut Ansell dan Gash, proses kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka).
- b) *Trust-building* (Membangun Kepercayaan).
- c) *Commitment to the process* (Komitmen terhadap proses)
- d) *Shared Understanding* (Pemahaman bersama)
- e) *Intermediate outcomes* (Hasil sementara).

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, disebut juga dengan metode kualitatif karena data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Jenis penelitian adalah deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat pada suatu obyek penelitian untuk mendapatkan

informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dan Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri yang terdapat di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah dokumen yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah

- 1) Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Program Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Data sekunder bisa berupa media, artikel dan data kepustakaan sebagai pendukung data primer. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- 1) Gambaran umum lokasi penelitian
- 2) Buku Petunjuk Teknis Kampung KB
- 3) Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB
- 4) Perundang-undangan

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan dipercaya untuk mewakili satu populasi tertentu.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru.	1
2.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian dan KB Kota Pekanbaru.	1
3.	Bidang Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB	1
4.	Ketua Umum Kampung KB Meranti Mandiri Kota Pekanbaru.	1
5.	Pembina Lapangan Kampung KB Meranti Mandiri Kota Pekanbaru.	1
	Jumlah	5

Sumber : Olahan Penulis, 2020

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan informan. Sebagai pendukung dalam pengumpulan data peneliti menggunakan alat seperti buku catatan, kamera serta rekaman saat melakukan wawancara.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumen yang relevan. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya ilmiah. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa profil, peraturan dan catatan lainnya. Adapun dokumen yang berbentuk gambar adalah foto, gambar struktur dan lain-lain.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah data-data yang peneliti peroleh selain data tulisan tetapi juga berbentuk keterangan wawancara antara peneliti dengan informan, setelah mengumpulkan data-data kemudian peneliti menganalisis, mendeskripsikan data dan menarik kesimpulan.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Collaborative Governance* dalam Program Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2020

Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut pendapat Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung agar terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus serta musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Proses kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu :

a. *Face to face dialogue (Dialog Tatap Muka)*.

Dialog tatap muka merupakan sarana untuk membangun kepercayaan, komitmen dan berbagi pemahaman bersama antar *stakeholder*. Komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif, karena komunikasi yang baik dan efektif dapat membangun kepercayaan dan komitmen serta

pemahaman antar anggota untuk bersama-sama mencapai tujuan dari kolaborasi.

Komunikasi yang dibangun antara pemerintah dengan pelaksana Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri sudah berjalan dengan baik. Kampung KB sendiri dirancang sebagai upaya mengaktualisasikan dan mengaplikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga melalui POKJA (Kelompok Kerja) Kampung KB dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembinaan antar POKJA (Kelompok Kerja).

b. *Trust-building (Membangun Kepercayaan)*.

Membangun kepercayaan merupakan proses yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil dari proses kolaborasi. Membangun kepercayaan antar aktor merupakan poin penting dari proses kolaborasi itu sendiri. Dimana, proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada dialog tatap muka saja akan tetapi juga membangun kepercayaan antar *stakeholder* (pemangku kepentingan). Membangun kepercayaan menjadi satu tahap yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar *stakeholder* (pemangku kepentingan) agar terbentuk komitmen yang kuat untuk menjalankan kolaborasi kedepannya.

c. *Commitment to the process (Komitmen terhadap proses)*.

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi para aktor dalam proses kolaborasi. Dalam membangun komitmen bersama terkait pengelolaan Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri, pihak Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB) Kota Pekanbaru dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau sebagai instansi terkait yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

d. Shared Understanding (Pemahaman bersama).

Pemahaman bersama adalah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing aktor dalam mencapai tujuan bersama. Saling berbagi pemahaman dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama dan ideologi yang sama. Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama dalam memaknai dan mengartikan suatu masalah. Tahap saling memahami antar aktor terkait kolaborasi yang dibangun dalam program Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri sudah berjalan cukup baik.

e. Intermediate outcomes (Hasil sementara).

Hasil sementara merupakan representasi dari hasil yang terukur melalui pelaksanaan proses kolaborasi. Hal ini menjadi suatu kebutuhan yang dibangun untuk mencapai keberhasilan proses kolaborasi. Dampak atau hasil sementara dari pelaksanaan proses kolaborasi yakni Pertama; masyarakat itu memahami bahwa program Kampung KB adalah program kampung keluarga berkualitas, Kedua; dengan adanya pertemuan-pertemuan pada Kampung KB sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik, Ketiga; apabila delapan pokja tersebut berjalan maka pengadministrasian dan pelaksanaan kegiatannya dapat terukur dengan baik.

2. Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance Program Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbi Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat berpengaruh atau menghalangi kinerja suatu instansi ataupun lembaga.

Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri Kelurahan Meranti Pandak sebagai berikut :

a) Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat adalah salah satu faktor penghambat dalam program Kampung Keluarga Berencana, diperlukannya sosialisasi dalam memberikan pemahaman secara utuh kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini masyarakat, mitra kerja (*stakeholder*) baik dari instansi pemerintahan dan non pemerintahan mengenai program Kampung Keluarga Berencana. Program Kampung Keluarga Berencana bukan hanya berfokus pada pemasangan alat kontrasepsi dan wanita dalam hal ini adalah ibu-ibu melainkan bertujuan untuk memberikan pengertian kepada semua anggota keluarga bagaimana membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera untuk mencapai tujuan utama yaitu berfokus kepada pembangunan manusia.

Belum semua lapisan masyarakat terutama masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak mendapatkan pengertian apa itu program Kampung Keluarga Berencana yang berjalan di wilayah mereka, karena masyarakat masih berasumsi bahwa program Kampung Keluarga Berencana adalah Kampung pemasangan alat kontrasepsi dan hanya berfokus kepada wanita dalam hal ini adalah ibu-ibu.

b) Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran sangat dibutuhkan dalam sebuah dinas pemerintahan atau organisasi dikarenakan anggaran dapat mempengaruhi hasil dari kinerja suatu instansi.

Prinsip pembiayaan Kampung Keluarga Berencana diutamakan adalah

menumbuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, prinsip pembiayaan Kampung Keluarga Berencana adalah dari oleh dan untuk masyarakat Kampung Keluarga Berencana itu sendiri. Namun, keterbatasan kemampuan masyarakat yang ada pada Kampung Keluarga Berencana, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan Kampung Keluarga Berencana melalui sumber-sumber yang legal.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. *Collaborative Governance* dalam melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu : *Face to face dialogue, Trust-building, Commitment to the process, Shared understanding, dan Intermediate outcomes*. Dari keseluruhan tahapan sudah terlaksana dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan tahapan *trust-building* belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena pelaksana program tidak memahami tugas dan fungsi bidangnya.
- b. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program Kampung Keluarga Berencana yang berjalan di wilayah mereka, karena masyarakat masih berasumsi bahwa program Kampung KB hanya sebatas pemasangan alat kontrasepsi dan keterbatasan anggaran yang belum

memadai dalam melaksanakan program Kampung KB.

2. Saran

- a. Pihak pengelola Kampung KB Meranti Mandiri di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir di harapkan lebih membina dan memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat mengenai program Kampung KB yang tidak hanya berfokus pada pemasangan alat kontrasepsi dan berfokus pada wanita saja dalam hal ini ibu-ibu melainkan bertujuan untuk membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dalam mencapai tujuan utama yaitu berfokus pada pembangunan manusia.
- b. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB) di harapkan lebih menjalin komunikasi dengan pihak-pihak pelaksana yaitu melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/70/SJ mengenai Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung KB di Kota Pekanbaru Tahun 2016 yang salah satu penetapannya berisi bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir Kelurahan Meranti Pandak merupakan wilayah penetapan pembentukan Kampung KB. Oleh karena itu, agar pemerintah mengetahui apa saja kendala dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kader-kader Kampung KB agar program Kampung KB di Kecamatan Rumbai Pesisir Kelurahan Meranti Pandak berjalan sesuai dengan yang di harapkan dan memberikan dampak positif untuk masyarakat.
- c. Kepada masyarakat Kampung KB Meranti Mandiri di harapkan turut berpartisipasi lebih aktif lagi baik itu dalam forum-forum musyawarah atau

sosialisasi pelaksanaan program
Kampung KB di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi, Ruslam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta. Ar-ruzz Media.
- Astuti Sunu, Retno. 2020. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang : DAP Press.
- Chris Ansell and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Berkeley : University of California.
- La Oda Syaiful Islamy. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi : CV Budi Utama.
- Moleong, L. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (Edisi Revisi). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Adon Jamaludin. 2016. Sosiologi Pembangunan. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Subarsono, Agustinus. 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintah Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta : Gava Media.
- Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT.Rafika Aditama.
- Sugiyono, 2021. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. Bandung : Alfabeta.

B. DOKUMEN

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2016. Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana.

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. 2017. Pedoman Pengelolaan Kampung KB.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Laju Pertumbuhan Penduduk. Kota Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Luas dan Presentase Luas Wilayah. Kecamatan Rumbai Pesisir.
- Badan Pusat Statistik. 2020. PUS dan Peserta KB. Kecamatan Rumbai Pesisir.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2018. Panduan Kampung KB Percontohan.
- Rencana Strategis BKKBN Nasional Tahun 2015-2019.
- Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

C. JURNAL

- Dian Eka Pertiwi, “Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Meranti Mandiri Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.8 No.1. Januari 2021.
- Fauziah Riska Rahmeina, “Koordinasi Dalam Program Kampung KB Di Kota Pekanbaru”, JOM FISIP, Vol. 5 No. 1, Tahun 2018.
- Kiki Endah, “Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 2 Tahun 2019.

Mardiyono, “Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat atau Keluarga Di Jawa Timur”, Jurnal Cakrawala, Vol.11 No.2, Desember 2017.

Novy Setia Yunas, “Collaborative Governance Melalui Program Kampung KB Di Kabupaten Jombang”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.5 No.2, November 2019.

Nur Laila Meilani, “Strategi Penguatan Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Program Kampung KB Di Kabupaten Pelalawan Dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau”, Jurnal Niara, Vol.12 No.1. Juni 2019.

Tiara Anggraini, “Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Kota Pekanbaru”, JOM FISIP, Vol. 6 No. 11. Juli 2019.

tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Kota Pekanbaru.

Keputusan Camat Rumbai Pesisir Nomor Kpts.KRS/V/2016/18